



BUPATI NGADA

T A N G G A P A N
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
TERHADAP PENGANTAR DAN NOTA KEUANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,
Syalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salve,
Salam Kebajikan,

Yang terhormat :

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngada;
 2. Bapak-bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada;
 3. Bapak Bapak Anggota DPRD Kabupaten Ngada;
 4. Penjabat Sekretaris Daerah Ngada;
 5. Staf Ahli Bupati Ngada,
 6. Asisten Sekda Ngada
 7. Pimpinan Perangkat Daerah;
- Singkatnya, hadirin yang saya hormati.

Puji dan syukur patut kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas cinta dan rahmat-Nya, maka kita kembali bertemu pada sidang paripurna ini untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024.

Melalui Fraksi-fraksi Dewan yang terhormat, telah disampaikan pandangan, apresiasi, dukungan maupun catatan kritis kepada pemerintah. Hal ini tentunya merupakan bagian dari semangat bersama untuk membangun dan memajukan Kabupaten Ngada yang kita cintai. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda cara menyampaikan aspirasi, namun tujuannya tentu sama adalah bagaimana memajukan Kabupaten Ngada

yang kita cintai bersama. Pendapat dan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024, serta hasil reses, pemantauan lapangan maupun rapat kerja komisi dan rapat gabungan komisi Dewan yang terhormat, menjadi masukan yang baik dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun yang akan datang.

Hadirin yang saya hormati,

Tanggapan dan penjelasan Pemerintah di bawah ini adalah uraian terhadap sejumlah pertanyaan dan saran yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi sebagai berikut:

I. FRAKSI PARTAI GERINDRA

A. Pendapatan.

Pemerintah memberikan apresiasi atas pandangan kritis Fraksi terkait capaian PAD tahun 2024. Terhadap capaian Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, realisasinya tidak mencapai 50% dari target yang ditetapkan, dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut :

- Pemerintah akan melakukan perhitungan kembali agar penetapan target tidak terlampau tinggi dengan memperhitungkan subjek dan objek retribusi yang riil. Sedangkan terhadap kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, capaian realisasi sangat tergantung pada kinerja Bank NTT dan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- Pemerintah berterimakasih terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra untuk terus meningkatkan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Terhadap hal ini pemerintah telah melakukan terobosan kebijakan yang signifikan dalam menggali potensi PAD melalui program orientasi CPNS yang saat ini sedang berlangsung dalam melakukan pendataan dan penagihan pajak dan retribusi secara masif diseluruh wilayah Kabupaten Ngada

B. Belanja.

1. Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya sebesar Rp1.775.100.000,00 atau 87,44 % dari total anggaran sebesar Rp2.030.000.000,00; dapat dijelaskan bahwa jumlah realisasi tersebut disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang berhak dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial di Tahun Anggaran 2024;
2. Terkait skala prioritas alokasi belanja modal berupa jalan, jaringan dan irigasi, dapat dijelaskan bahwa mengingat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maka skala

prioritas untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

3. Realisasi Bantuan Tak Terduga sebesar 53%, dapat dijelaskan bahwa realisasi tersebut disesuaikan dengan kondisi nyata keadaan darurat dan atau kebencanaan yang terjadi selama tahun 2024.
4. Penggunaan dana daerah sebesar Rp42.500.000.000,00 dari Bank NTT, dapat dijelaskan bahwa Dana Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pembangunan Zona Penerimaan dan Pendukung Kebun Raya Wolobobo, Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Jodo, Pengadaan Traktor TR 4 50 unit, Pengadaan Handtractor 24 unit, Mesin Pengelola Kemiri, Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Belanja Obat-Obatan dan Bahan Kimia), Pengawasan mutu/bibit ternak bahan pakan/tanaman skala kecil, Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, pengadaan obat obatan dan vaksin untuk menanggulangi wabah penyakit hewan menular, Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Gudang Pakan), Pembangunan Rehabilitasi Rumah Potong Hewan, Penataan Kolam Mancing dan Sarana Pendukung Kolam Mancing KPI Bejo, Pembangunan Rehabilitasi Rumah Potong Hewan, Pembangunan Kolam Budidaya Bioflok, Pengadaan sarana dan Prasarana Perikanan (Kapal Penangkapan Ikan < 5GT, Penyelenggaraan Jalan, Pembukaan Jalan Baru, Pembangunan Jembatan Malapedho, Peningkatan jalan, Perluasan Jaringan Air Bersih, Pengelolaan dan rehabilitasi Saluran Irigasi, Pembangunan RSUD Bajawa (Unit Rawat Jalan), Pengelolaan TPA (Pengadaan Truck Amrol, Pick Up Sampah, Bak Amrol dan rahab rumah incenator), Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan alat uji KIR serta Belanja Modal alat Peternakan (container);
5. Terkait Rencana Alokasi SiLPA 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. *Restricted* SiLPA (SiLPA yang dibatasi penggunaannya):
 1. Belanja BLUD Sebesar Rp5.898.251.216,13;
 2. Belanja BOS sebesar Rp106.169.373,00;
 3. Belanja FKTP sebesar Rp1.110.594.404,84;
 4. Kas Dana BOSP PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp675.000,00;
 5. Belanja BOK sebesar Rp3.119.548.895,

6. Belanja atas Dana Kas Lainnya (Jaminan Kesungguhan Tambang) yang wajib dikembalikan berdasarkan nilai Kurs Rupiah terkini sebesar Rp1.762.159.689,00
 7. Sisa Dana Non Kapitasi yang harus dianggarkan Kembali pada Dinas Kesehatan sebesar Rp398.780.341,26;
 8. BTT untuk Dana Pihak Ketiga (KONI, Dana Bencana) yang tercatat sebagai Kasda sebesar Rp1.250.000.000,00;
 9. Kewajiban Pemda yaitu Retensi Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp2.476.529.000,00 dan Pendanaan untuk sisa KDP 2024 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 10. Penggunaan SiLPA di Induk 2024 sebesar Rp22.487.950.000,
 11. Sisa Dana *earmarked* (DAK Fisik dan Non Fisik) sebesar Rp36.054.900.000.
- b. *Unrestricted* SiLPA (SiLPA yang Tidak dibatasi Penggunaannya) sebesar Rp5.081.169.571,23.
6. Temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti dan progres realisasi Rencana Aksi 60 hari, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Catatan Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada 16 SKPD, ditindaklanjuti oleh TAPD dengan membuat pedoman dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya;
 - b. Catatan Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha pada Sembilan SKPD Belum Memadai, ditindaklanjuti oleh Kepala Bapenda mengusulkan tarif Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Penyewaan Tanah dan Bangunan dan Penyewaan Bangunan dan Kepala Dinas PUPRP mengusulkan jatuh tempo pembayaran, dan sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran Retribusi Jasa Usaha - Sewa Alat Berat;
 - c. Terkait Perhitungan Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Bapenda Tidak Sesuai Ketentuan; ditindaklanjuti oleh Kepala Bapenda dengan memproses kelebihan pembayaran senilai Rp Rp98.338.282,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah
 - d. Catatan terkait Pembayaran Belanja Honorarium Pada Lima SKPD Tidak Sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 53 Tahun 2023, ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Ngada kepada seluruh SKPD agar dalam mempertanggungjawabkan Belanja Honorarium berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyusunan Peraturan Bupati Ngada tentang Standar Harga

yang antara lain mengatur tentang ketentuan pembayaran honorarium narasumber atau pembahas yang berasal dari SKPD penyelenggara;

- e. Terkait Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan, ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Ngada kepada seluruh SKPD yang di dalamnya memuat tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai bukti riil; melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan; serta pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan;
- f. Terkait Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Belum Sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati Ngada tentang Petunjuk Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang mengatur antara lain kriteria keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan kriteria kegiatan SKPD yang tidak termasuk kegiatan darurat tetapi mendesak untuk dilaksanakan menggunakan Belanja Tidak Terduga, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Terkait Pelaksanaan Enam Paket Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli, Jasa Konsultansi Konstruksi, dan Jasa Konsultansi Kajian pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan, ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas PUPRP untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp93.664.917,42 dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan senilai Rp19.058.015,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- h. Terkait Pelaksanaan Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Jalan Irigasi dan Jaringan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan, ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Bajawa, dan Kepala Dinas PUPRP untuk memproses potensi kelebihan pembayaran senilai Rp608.574.885,98 dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan minimal senilai Rp1.976.141.757,73 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- i. Terkait Pengelolaan Kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Belum Tertib, ditindaklanjuti dengan membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran deposito, jangka waktu, dan bank yang ditunjuk untuk mengelola deposito, membuat

perjanjian antara BUD dan Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola deposito sesuai Perbup Nomor 13 Tahun 2022 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai tugas dan wewenang bendahara, ketepatan waktu atas penyetoran sisa UP oleh Bendahara Pengeluaran, dan penyetoran penerimaan pendapatan daerah oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah;

- j. Terkait Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Ngada Belum Tertib, ditindaklanjuti dengan memproses dokumen pemanfaatan dan hibah atas 19 bidang tanah yang dimanfaatkan oleh enam instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait melakukan pemasangan papan nama kepemilikan pemerintah daerah pada 41 unit rumah negara yang berada dalam penguasaannya.

Pemerintah memberikan apresiasi dan akan menindaklanjuti poin-poin penting terkait kemandirian fiskal daerah, realisasi sektor retribusi dan pemungutan terhadap potensi pajak lokal, pengelolaan belanja modal dan pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta laporan mendalam atas tindak lanjut temuan BPK.

II. FRAKSI AMANAT DEMOKRAT

A. Pemerintah memberikan apresiasi terhadap Pemandangan Umum Fraksi Amanat Demokrat, terkait capaian Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi yang masih sangat rendah, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Perubahan regulasi atas target yang sudah ditetapkan tapi tidak boleh dipungut lagi seperti retribusi pengawasan menara telekomunikasi, KIR, izin trayek, sewa rumah dinas;
- Perangkat Daerah pengampu retribusi belum optimal dalam dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah;
- Perhitungan proyeksi teknis Pendapatan Asli Daerah yang tidak sesuai kenyataan;
- Kurangnya pengawasan dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- Kurangnya kepatuhan dan keakuratan pembayaran oleh wajib pajak dan retribusi;
- Kondisi Perekonomian yang lesu.

B. Terkait Belanja Daerah dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan nomor 229 yang ada pada lampiran XIX Ranperda APBD untuk pengerjaan Telford kampung Raja – Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo sebesar Rp105.306.000 merupakan paket pekerjaan tahun 2007 yang dikerjakan oleh CV.Sumber Kasih sudah terealisasi sebesar Rp100.040.700, sisanya sebesar Rp5.265.300,00 merupakan utang retensi, atas retensi tersebut sampai dengan saat ini belum diajukan oleh pihak ketiga sehingga tetap tercatat sebagai utang retensi. Untuk Kecamatan Nangaroro paket pekerjaan senilai Rp141.298.000,00 merupakan paket pekerjaan 2006 yang oleh kontraktor CV.Wajah Baru belum melakukan pengajuan pembayaran retensi sebesar Rp7.064.900 sehingga pemerintah tetap berkewajiban untuk mencatat dalam laporan keuangan, sedangkan nilai Rp.166.499.000 diurutkan 231 lampiran XIX Ranperda Pertanggungjawaban APBD adalah nilai untuk paket pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan Boba – Watuneba yang terkontrak pada tahun 2008 oleh CV Gunung Meja, yang telah direalisasikan pembayarannya sebesar Rp158.174.050 retensi yang belum diklaim oleh pihak ketiga sebesar Rp8.324.000 tetap tercatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk pekerjaan 607 lampiran XIX pada Dinas Kesehatan berupa penambahan ruang rawat jalan Puskesmas Maronggela sisa sebesar Rp104.395.000,00 adalah utang retensi kepada pihak ketiga.
3. Terkait paket pekerjaan pembangunan dan pengembangan Jetty nilai kontrak sebesar Rp1.900.555.000,00 realisasi pembayaran sebesar Rp1.805.527.250,00 sisa sebesar Rp95.027.750,00 adalah utang retensi kepada CV.Budindo Pritama yang terkontrak pada tahun 2008.
4. Paket pekerjaan pembangunan pagar pengaman Gedung kantor BPP Jerebuu nilai kontrak Rp40.000.000,00 realisasi pembayaran sebesar Rp38.000.000,00 sisa Rp2.000.000,00 adalah utang retensi kepada CV.Daya Cipta Kreasi dan sampai saat ini CV.Daya Cipta belum mengajukan pembayaran atas sisa tersebut. Untuk paket pekerjaan nomor 467 lampiran XIX berupa pembangunan lantai jemur kentang dikerjakan oleh CV.Maravilas pada tahun 2014 sampai saat CV tersebut belum mengklaim pembayaran retensi sebesar Rp1.500.000,00 sehingga masih tetap tercatat dalam Laporan Keuangan Kabupaten Ngada.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngada pada tahun 2024 selain melayani kebutuhan air minum untuk Masyarakat kabupaten Ngada juga mencatatkan Pendapatan sebesar

Rp10.762.587.478,00 beban operasional sebesar Rp10.187.833.124,00 sehingga mencatat laba operasional sebesar Rp574.754.355,00. Adapun terkait permintaan penjelasan rincian operasional dari Fraksi Amanat Demokrat dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a) Beban pegawai	Rp4.509.676.456
b) Beban Listrik	Rp333.803.918
c) Beban BBM	Rp118.984.581
d) Beban Pemeliharaan	Rp605.513.050
e) Beban Penyusutan	Rp2.649.290.041
f) Beban Penyisihan Piutang	Rp173.069.698
g) Beban Operasional Lainnya	Rp1.797.495.380
Total Beban Operasional	Rp10.187.833.124

Pemerintah juga memberikan apresiasi dan akan menindaklanjuti point point penting terkait konsistensi pelaksanaan APBD, rekrutmen Pengurus Perumda Air Minum serta penyampaian Dokumen KUA/PPAS untuk Ranperda APBD Perubahan 2025.

III. FRAKSI PDI PERJUANGAN

A. PENDAPATAN DAERAH

Terhadap catatan fraksi tentang PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang capaian targetnya belum optimal, dapat pemerintah jelaskan bahwa:

1. Rendahnya capaian target Retribusi Daerah yang tersebar pada 16 perangkat daerah masih disebabkan oleh perubahan regulasi, perangkat daerah pengampu belum optimal bekerja, perhitungan proyeksi teknis PAD yang tidak sesuai kenyataan, kurangnya pengawasan dan pengendalian, kurangnya kepatuhan dan keakuratan pembayaran oleh wajib pajak dan retribusi dan kondisi perekonomian yang lesu. Atas sebab-sebab tersebut, pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan pengawasan untuk meningkatkan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari retribusi.
2. Atas rendahnya capaian PAD dari Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, hal itu disesuaikan dengan besaran deviden yang diterima disesuaikan dengan proporsi besaran penyertaan modal pada bank NTT. Oleh karena itu capaian tingkat kinerja Bank NTT tempat pemerintah daerah menempatkan penyertaan modal dan Perusahaan Daerah Air Minum, mempengaruhi capain PAD dari Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3. Sehubungan dengan pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, pemerintah akan terus bekerja dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, dalam hal ini pemerintah akan segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang tarif sewa tanah, tanah dan bangunan dan bangunan yang merupakan aset daerah.

B. BELANJA DAERAH

1. Atas catatan fraksi terkait realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang disampaikan yakni setiap belanja harus dirincikan penggunaannya sehingga dari persentasenya kita dapat melihat grafiknya, pemerintah mengapresiasi catatan ini dan akan ditindaklanjuti pada penyajian data terkait realisasi belanja yang dibutuhkan di waktu yang akan datang.
2. Atas catatan fraksi terkait realisasi belanja dari pos bantuan sosial yang hanya terealisasi sebesar 87,44% dapat pemerintah jelaskan bahwa obyek belanja bantuan sosial tersebut terdiri dari:
 - a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dengan pagu anggaran sebesar Rp1.982.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.727.100.000,00 atau 87,13. Jumlah realisasi tersebut disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial di tahun 2024
 - b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dengan pagu anggaran sebesar Rp 48.000.000,00 dan terealisasi sebesar 100%.
3. Atas catatan fraksi terkait realisasi Belanja Tidak Terduga yang hanya terealisasi sebesar 53,02% dapat pemerintah jelaskan bahwa ketentuan penggunaan dana BTT hanya terbatas dalam kategori tertentu yaitu pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, Keadaan darurat seperti bencana.
4. Atas catatan fraksi terkait Belanja Bagi Hasil yang hanya mencapai realisasi sebesar 59,22% dapat pemerintah jelaskan bahwa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, realisasi pencairannya kepada desa diatur sesuai capaian realisasi pajak daerah pada masing-masing desa. Bila realisasi pajak daerah pada desa dimaksud mencapai target sesuai proporsi yang telah ditentukan, maka belanja bagi hasil untuk desa dimaksud bisa direalisasikan; demikian pun sebaliknya.

IV. FRAKSI PARTAI NASDEM

Pemerintah menyampaikan terimakasih atas apresiasi dan atensi yang diberikan oleh Fraksi Partai Nasdem terhadap pengelolaan keuangan selama tahun 2024 yang berujung pada Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Pemerintah menyadari bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi yang harus dirayakan besar-besaran, namun merupakan standar kepatuhan dan ketaatan kita terhadap aturan dan regulasi pengelolaan keuangan yang berlaku, yang wajib ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pemerintah membutuhkan kerjasama dengan Lembaga Dewan Yang Terhormat melalui saran dan masukan yang konstruktif demi mempertahankan dan meningkatkan mutu pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Menanggapi Catatan dan Rekomendasi Fraksi Partai Nasdem, pemerintah menerima sebagai saran perbaikan yang sangat membangun dengan strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Terkait Keterlambatan Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD :
Untuk meminimalisir resiko keterlambatan penyampaian Ranperda APBD, pemerintah akan melakukan percepatan penyusunan laporan keuangan dengan meningkatkan frekuensi pendampingan pertanggungjawaban keuangan dan barang oleh perangkat daerah secara lebih dini melalui mekanisme rekonsiliasi dan bimbingan teknis. Pemerintah berkeyakinan apabila Laporan Keuangan telah disusun secara tepat waktu, maka penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD juga akan tepat waktu.
- b. Terkait Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
Berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem untuk optimalisasi PAD ini sejatinya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun langkah perbaikan dan pembaruan strategi akan dilakukan salah satunya melalui program orientasi CPNS yang saat ini sedang berlangsung, untuk melakukan pendataan potensi serta penagihan pajak dan retribusi secara masif diseluruh wilayah Kabupaten Ngada.
- c. Terkait Tindak Lanjut Temuan Audit BPK :
Saat ini proses yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Ngada kepada perangkat daerah agar melakukan penagihan kepada pihak atau pelaku temuan. Dan proses ini selalu dipantau oleh Inspektorat selaku perangkat pengawas dengan cara melakukan *update* data dukung tindak lanjut temuan melalui istem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).
- d. Terkait Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) :

Pemerintah selalu berupaya melakukan inovasi strategi pengendalian internal yang relevan dari waktu ke waktu agar selalu beriringan dengan perkembangan zaman, sehingga pola pengendalian internal kita menjadi efektif dan efisien.

e. Terkait Realisasi Belanja Modal :

Untuk capaian realisasi belanja modal ini sejalan dengan capaian fisik konstruksi, sehingga perbaikan ke depannya pemerintah akan mengevaluasi tata cara pengadaan bangunan konstruksi secara lebih efektif dan cermat serta relevan dengan regulasi fiskal dan kebutuhan masyarakat kita.

f. Terkait Penyelesaian Piutang Pajak :

Untuk hal ini akan selalu dilakukan upaya penagihan, baik kepada debitur dalam daerah maupun pemerintah provinsi.

g. Terkait Beberapa hal yang diangkat fraksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk persoalan infrastruktur jalan, bendungan, irigasi, Pemerintah akan melakukan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam rangka tanggap darurat kebencanaan pada berbagai lokasi rawan bencana ataupun pasca bencana demi memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jalan di sela – sela kondisi alam yang tidak menentu ini. Tentunya pemerintah akan senantiasa proaktif memastikan akses-akses jalan penghubung ke lokasi strategis selalu terbuka, saluran irigasi dan bendungan juga tersedia dengan baik yang semuanya untuk peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.
- Untuk persoalan honorarium Tenaga BOSDIK, pemerintah akan melakukan pembayaran sesegera mungkin sesuai dengan prosedur dan mekanisme penatausahaannya.
- Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Kabupaten Ngada, pemerintah telah memfasilitasi pembukaan dapur sehat dalam mendukung Program Makanan Bergizi Gratis di setiap kecamatan dengan menyiapkan 5 lahan pada 5 Kecamatan untuk pembangunan dapur sehat. Adapun lokasi dapur sehat yang telah diusulkan oleh Pemerintah ke pemerintah pusat sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Golewa Barat berlokasi di Jalan Bajawa Ende (samping Alfamart) telah dilaksanakan pinjam pakai kepada Kodim 1625 Bajawa dengan Nomor Perjanjian Pinjam Pakai 20/PPP/HK/2023 dan B/118/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
 - b. Kecamatan Riung Barat berlokasi di Desa Wolomeze berupa Tanah Kosong.

- c. Kecamatan Riung berlokasi di Kelurahan Nangamese Kompleks Kantor Camat Riung.
 - d. Kecamatan Bajawa Utara berlokasi di Desa Watukapu Kompleks Kantor Camat Bajawa Utara.
 - e. Kecamatan Wolomeze berlokasi di Desa Denatana Timur Kompleks Kantor Camat Wolomeze.
- Terhadap Program Pemberian Pakaian Seragam Gratis dan Beasiswa untuk siswa maupun mahasiswa, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan secara adil kepada warga masyarakat Kabupaten Ngada yang memenuhi syarat, tanpa adanya diskriminasi dan tebang pilih.

V. FRAKSI PARTAI PERINDO

A. PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Perindo terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan pada jenis penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Terhadap catatan Fraksi Perindo atas realisasi retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum mencapai target, serta capaian secara umum PAD pada tahun 2024 yang menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, maka dengan ini dapat pemerintah jelaskan bahwa hal tersebut terjadi antara lain disebabkan oleh adanya perubahan regulasi yang menyebabkan target pendapatan yang telah ditetapkan tidak dapat dipungut lagi. Selain itu capaian realisasi atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sangat tergantung kepada kinerja Bank NTT dan Perusahaan Daerah Air Minum. Terhadap komponen komponen yang belum mencapai target, pemerintah akan terus berusaha melakukan langkah langka inovatif untuk memperbaikinya pada masa yang akan datang.

B. BELANJA DAERAH

Atas permohonan fraksi untuk penjelasan pemerintah terkait beberapa item belanja yang realisasinya tidak sesuai dengan target dapat pemerintah jelaskan bahwa kurang realisasi dari pagu anggaran belanja yang ditetapkan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer terjadi karena:

1. Realisasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi riil di tahun 2024, misalnya keadaan terkait jumlah pegawai dan besaran gaji yang harus dibayar.
2. Adanya kondisi keterlambatan tender atas paket pekerjaan.

3. Adanya keterlambatan pengajuan yang dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
4. Adanya paket-paket pekerjaan yang belum direalisasikan 100% di tahun 2024 dan dilanjutkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk tahun anggaran 2025 dan sisa dana atas paket pekerjaan tersebut terakumulasi dalam SILPA tahun 2024.

Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi terkait optimalisasi realisasi belanja sehingga bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat pada tahun perencanaan. Secara prinsip setiap belanja yang direncanakan harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu rekomendasi Fraksi terkait Pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasab pembangunan menjadi catatan penting untuk dilakukan oleh pemerintah secara bertahap.

VI. FRAKSI PARTAI GOLKAR

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas atensi dan dukungan Fraksi terkait capaian PAD serta berbagai program pelayanan dasar sektor pendidikan dan kebudayaan. Sasaran yang ingin dicapai di sektor pendidikan dan kebudayaan adalah meningkatnya kualitas pendidikan dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan fraksi terhadap pencapaian sasaran ini, akan mendorong pemerintah untuk semakin mengoptimalkan pelayanan di sektor ini. Terkait capaian PAD di sektor pendidikan, merupakan konsekuensi dari penggunaan aset, yang tentunya akan disesuaikan dengan ketentuan terbaru yang termuat dalam Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Dinas Kesehatan dan RSUD Bajawa

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan Fraksi terhadap program-program pelayanan di sektor kesehatan dasar dan kesehatan Rujukan; terutama terkait capaian PAD, sistem layanan kesehatan berbasis desa serta peningkatan kualitas SDM kesehatan serta penguatan sistem manajemen RSUD. Sebagai bagian dari fungsi pelayanan dasar, berbagai kebijakan akan terus dilakukan diantaranya terkait peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan serta peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan
Terima kasih atas dukungan fraksi terkait pentingnya akselerasi pembangunan jalan lingkungan dan perumahan rakyat sebagai faktor pendukung pelayanan dasar lainnya. Dalam pelaksanaan fungsinya, Dinas PUPRP tetap berkolaborasi dengan lintas sektor baik pemerintah desa, Perangkat daerah terkait, pemerintah pusat maupun masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan ada pola sharing sumber daya baik berupa anggaran maupun SDM untuk meningkatkan pelayanan publik. Catatan kritis terkait optimalisasi PAD, tentu akan menjadi atensi pemerintah ke depan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi terhadap upaya penegakan perda dan perlindungan masyarakat. Pendekatan persuasif dan sosialisasi yang berkelanjutan, serta dukungan kapasitas personil dan sarpras yang memadai tentu menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian bersama ke depan dalam upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan fraksi terkait penanganan kebencanaan di Kabupaten Ngada. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, pemerintah tetap berupaya memberikan pelayanan terhadap berbagai kerusakan sarana dan prasarana publik sebagai akibat dari bencana. Memang belum semua bisa ditangani optimal karena adanya berbagai keterbatasan baik pada sisi sarana prasarana, anggaran, personil maupun kewenangan. Oleh karena itu harapan fraksi agar penguatan sinergi lintas sektor, optimalisasi penggunaan anggaran untuk memperkuat sistem mitigasi dan edukasi masyarakat, akan menjadi perhatian pemerintah.
6. Dinas Sosial
Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi terhadap program perlindungan sosial, dan pentingnya peningkatan akurasi data. Pelaksanaan Program-program perlindungan sosial selama ini mengacu pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ke depan, DTKS akan diganti dengan Data Tunggal Sosial ekonomi (DTSEN) untuk mengintegrasikan berbagai data sosial ekonomi, termasuk data Registrasi Sosial Ekonomi (regsosok) dan Pemetaan Potensi ekonomi Keluarga (P3KE), guna meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penyaluran bansos.

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi terhadap langkah-langkah penguatan kapasitas tenaga kerja lokal serta dukungan terhadap penempatan tenaga kerja dan pelatihan, dan harapan fraksi agar dinas mampu menjawab tantangan peningkatan produktifitas tenaga kerja berbasis potensi unggulan daerah, hal itu menjadi atensi kita bersama, seperti yang tertuang dalam misi ke 2 RPJMD Tahun 2025-2029

2. Dinas Lingkungan Hidup

Upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, tetap menjadi atensi pemerintah yang dilakukan melalui berbagai progam diantaranya pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta program pengelolaan persampahan.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi terhadap pelaksanaan layanan kependudukan kepada masyarakat. Dukungan fraksi terhadap penguatan sistem digitalisasi data kependudukan untuk pelayanan yang cepat dan akurat, akan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk lebih memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah berterima kasih dan memberikan apresiasi atas dukungan dan atensi Fraksi Golongan Karya terhadap urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Ngada. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor termasuk NGO yang bergerak dan sebagai pemerhati urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka memberdayakan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan, melalui advokasi kebijakan anggaran, program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes maupun dana pihak ketiga

5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi terhadap pelaksanaan program keluarga berencana dan edukasi kependudukan, dan harapan fraksi agar sinergi dengan sektor pendidikan dan kesehatan dalam mengintegrasikan program KB

berbasis Komunitas, sudah dilakukan dengan menysasar pada kelompok Remaja pada sekolah-sekolah. Kedepannya, kolaborasi ini diharapkan bisa dioptimalkan lagi

6. Dinas Perhubungan

Terhadap pemandangan umum Fraksi Golkar, tentang kualitas dan cakupan transportasi umum serta infrastruktur perhubungan, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah telah melakukan Upaya dalam peningkatan kualitas seperti melakukan pengadaan dan pemasangan prasarana seperti rambu lalu lintas, marka jalan serta rehabilitasi terminal di dalam kota Bajawa di Tahun 2025. Selain itu untuk cakupan transportasi umum saat ini terdapat kendala diantaranya armada angkutan umum yang kurang memenuhi syarat, kepemilikan armada secara individu sehingga tidak bisa mengeluarkan ijin trayek, trayek angkutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 56 Tahun 2022, serta infrastruktur yang masih belum memadai. Pemerintah akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan untuk mengatasi persoalan tersebut secara bertahap.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika

Terkait harapan Fraksi Golkar bahwa akses Komunikasi di wilayah terpencil tetap menjadi perhatian utama yang harus ditindaklanjuti dapat pemerintah jelaskan, bahwa masih ada 30 Desa di wilayah Kabupaten Ngada yang belum tersedia/terjangkau jaringan internet (Blank Spot). Pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia) melalui Surat Permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Nomor: 585;KOMINFO/01/06/2024 tanggal 07 Juni 2024, termasuk permohonan bantuan akses Internet Bakti pada tempat atau lokasi Pelayanan Publik.

8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, dan harapan fraksi terkait perluasan akses pembiayaan dan insentif serta fasilitasi pelatihan akan menjadi atensi pemerintah, seperti yang tertuang dalam salah satu sasaran misi 1 RPJMD Tahun 2025-2029, yakni meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas.

9. Dinas Penanaman Modal

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang efisien, serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Kolaborasi berbagai pihak baik investor lokal maupun

investor dari luar terus didorong, sehingga bisa memberi dampak langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas atensi dan dukungan Fraksi terkait pembangunan karakter generasi muda melalui kegiatan kepemudaan dan Olahraga. Berkaitan dengan pembinaan atlet berbakat dari tingkat desa hingga kabupaten, akan menjadi perhatian pemerintah, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

11. Dinas Kearsipan

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap akselerasi digitalisasi arsip serta sistem pelayanan informasi publik yang terintegrasi. Melalui aplikasi SRIKANDI atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, harapan fraksi tersebut diharapkan bisa diterapkan secara lebih optimal.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Dinas Perikanan

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas atensi dan dukungan Fraksi terkait upaya menjaga produktivitas sektor perikanan. Upaya pengembangan perikanan tangkap serta budidaya, akan terus dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari penjabaran misi pertama RPJMD, diantaranya penyediaan sarana prasarana penangkapan ikan.

2. Dinas Pariwisata

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi Golkar terhadap pelaksanaan program pariwisata. Kami tetap berupaya untuk terus mengembangkan sektor pariwisata pada Tahun 2025 dengan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai sektor (pentahelix) untuk memperoleh dukungan pengembangan tempat wisata alam yang berkelanjutan, budaya local, religius dan potensi pariwisata lainnya. Adapun kegiatan kolaborasi tersebut yang akan dilaksanakan antara lain;

- Pelaksanaan event Internasional Sail to Indonesia 2025 di Riung yang menjadi salah satu titik singgah peserta sail yang berkolaborasi dengan program In Flores Kementerian Kehutanan
- Pelaksanaan Balap sepeda Tour de Flores/Tour de NTT yang berkolaborasi dengan Dispar NTT
- Penyelenggaraan Festival Wolobobo, yang masuk Pada 110 Kharisma Event Nusantara berkolaborasi dengan Kemenparekraf, BPO Labuan Bajo Flores, Yayasan Bambu Lestari dan MPIG Kopi AFB, serta KKN Mahasiswa UGM 2025

Semoga dengan kolaborasi dan dukungan ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan peluang kunjungan wisatawan ke obyek wisata untuk Pengembangan Pariwisata dan menggerakkan ekonomi di desa dan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas atensi dan perhatian Fraksi terkait upaya ketahanan pangan daerah. Berkaitan dengan optimalisasi pendapatan serta program sektor pertanian yang bersifat partisipatif, akan menjadi perhatian pemerintah, disesuaikan dengan kondisi anggaran.

4. Dinas Peternakan

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas atensi dan dukungan Fraksi terkait capaian PAD sektor peternakan serta berbagai program yang terkait diversifikasi produk peternakan, dukungan pasar dan teknologi guna mendukung daya saing peternak lokal.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Harapan fraksi terkait penguatan program hilirisasi produk lokal, fasilitasi legalisasi usaha, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro di pasar rakyat dan sentra industri desa, secara bertahap sudah dilakukan oleh pemerintah, walaupun belum menjangkau semua pelaku usaha. Harapan ini akan menjadi perhatian pemerintah, sebagai bagian dari penjabaran misi pertama RPJMD.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Golkar, terkait peran koordinatif perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pemerintah sependapat dengan harapan fraksi terkait pentingnya penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan administrasi berbasis digital serta pengendalian dan evaluasi berkala perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan fungsi manajemen ini menjadi hal mendasar untuk memastikan pelaksanaan fungsi pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

2. Sekretariat DPRD

Sebagai *supporting system* kelembagaan DPRD, peran sekretariat DPRD perlu terus didorong sehingga berperan secara optimal. Oleh karena pemerintah sependapat dengan harapan Fraksi terkait peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dan penguatan peran kesekretariatan untuk memperkuat kemitraan yang kritis dan konstruktif antara pemerintah dan DPRD.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan oleh Fraksi Partai Golkar. Kolaborasi dengan Lembaga Akademik dan Komunitas riset Lokal, menjadi bagian dari fungsi BP-Litbang, yang saat ini telah berubah nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Berbagai kolaborasi dan kerjasama kemitraan telah dilakukan baik dengan perguruan tinggi, LSM, dan lembaga kemitraan luar negeri. Sedangkan optimalisasi komunitas riset lokal maupun peneliti-peneliti lokal, tentu menjadi catatan untuk pelaksanaan ke depan. Terkait Evaluasi program dan penerapan SIPD, telah dilakukan secara berkala, dan menjadi input dalam penyusunan kebijakan Tahunan.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Terima kasih atas dukungan Fraksi terkait Penatausahaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah. Pada sisi penatausahaan keuangan, Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi, secara bertahap sudah mulai menerapkan prinsip penatausahaan yang baik. Meskipun masih ada satu dua catatan seperti yang direkomendasikan BPK, yang perlu diperbaiki pada tahun berjalan maupun pada tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan terkait penatausahaan aset, masih perlu didorong untuk lebih dioptimalkan oleh PD.

3. Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah sepakat dengan catatan Fraksi Golkar bahwa kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan. Pemerintah juga mengapresiasi dukungan fraksi Golkar dalam upaya pemerintah memperluas basis pajak dan retribusi daerah

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap lembaga DPRD yang telah memberikan rekomendasi dalam penataan sistem promosi dan mutasi berbasis kinerja dan kompetensi serta integrasi system informasi kepegawaian yang transparan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memuat konsep dasar bahwa untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, ASN harus memiliki kompetensi profesional. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil menekankan proses pengisian jabatan, promosi, rotasi dan mutasi harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan juga syarat jabatan. Hal ini menjadi perhatian bagi Tim Penilai Kinerja dalam proses

perencanaan promosi dan mutasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Hasil perencanaan selanjutnya diserahkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara telah diatur melalui Peraturan BKN nomor 7 tahun 2023. Tujuannya untuk mengelola data dan informasi ASN secara elektronik, sehingga menjamin efisiensi, efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Saat ini setiap ASN dapat mengakses layanan kepegawaian secara mandiri dan online melalui akun masing-masing ASN.

Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap pandangan Fraksi, terhadap pentingnya meritokrasi dalam pengembangan karir ASN sebagai upaya tercapainya sistem manajemen ASN yang transparan dan terintegrasi. Terkait pelaksanaan teknis dan kepemimpinan yang berkelanjutan bagi ASN, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kompetensi ASN yang profesional dan berkualitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam mewujudkan pencapaian RPJMD di bidang pengembangan sumber daya manusia.

F. Unsur pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Penguatan Fungsi Pengawasan Preventif

Pemerintah patut memberi apresiasi kepada Fraksi Golkar atas catatan dan masukan untuk Inspektorat agar lebih mengedepankan pola pengawasan berbasis preventif. Pola pengawasan berbasis preventif, Inspektorat telah melaksanakan sosialisasi, Bimtek, Monitoring dan Evaluasi dan membuka KLINIK KONSULTASI setiap hari Selasa dan Kamis pada jam kerja. Disamping KLINIK KONSULTASI, Inspektorat juga membuat group Whatsapp "MEDIA KONSULTASI INSPEKTORAT" sebagai wadah konsultasi dan diskusi online bagi bendahara Desa dan bendahara Sekolah dalam kaitan dengan penatausahaan keuangan.

2) Optimalisasi Audit Kinerja dan Tematik

Pemerintah memberi apresiasi kepada Fraksi Golkar atas catatan dan masukan untuk Inspektorat dalam hal Optimalisasi Audit Kinerja dan Tematik. Terhadap pelaksanaan audit Kinerja Inspektorat telah melaksanakan untuk beberapa Perangkat Daerah untuk memenuhi tuntutan pemenuhan Kapabilitas APIP dari level 2 menuju level 3.

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan

Pemerintah memberi apresiasi kepada Fraksi Golkar atas catatan dan masukan untuk Inspektorat agar memperkuat pengawasan berbasis digital dengan mengintegrasikan Sistem Pelaporan dan Monitoring yang real time. Terhadap catatan dan masukan tersebut, untuk pengawasan dan pembinaan di Desa, Inspektorat telah menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES). Dan untuk pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah, Inspektorat membutuhkan dukungan aplikasi pengawasan berbasis Web.

4) Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan BPK

Pemerintah memberi apresiasi kepada Fraksi Golkar atas catatan dan masukan untuk Inspektorat untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Lembaga Pengawasan Eksternal (BPK) dan Aparat Penegak Hukum. Terhadap catatan dan masukan, Inspektorat telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPK dan APH sehubungan dengan pengaduan masyarakat terhadap indikasi penyalahgunaan keuangan baik di pemerintahan desa maupun di Perangkat Daerah sesuai dengan MOU dan regulasi yang berlaku.

G. Unsur Kewilayahan

Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi yang menekankan bahwa pembangunan berbasis wilayah adalah wujud semangat otonomi daerah, serta pentingnya efektivitas pelaksanaan program hingga ke level kecamatan demi terwujudnya pembangunan yang inklusif, merata dan berkelanjutan.

Terkait pemerataan dan keadilan alokasi anggaran antar kecamatan memang menjadi salah satu pendekatan dalam kebijakan alokasi anggaran, namun yang lebih utama adalah kebijakan penganggaran berbasis kebutuhan dan permasalahan. Sehingga wilayah terpencil yang aksesnya masih terbatas terkait sarana dan prasarana dasar, serta wilayah potensial yang dapat mendorong pertumbuhan kewilayahan, menjadi prioritas dalam pola alokasi anggaran.

Point penting yang diangkat fraksi terkait Optimalisasi Musrenbang Kecamatan sebagai bagian dari perencanaan partisipatif dalam perumusan kebutuhan lokal, serta peran camat sebagai penggerak pembangunan kecamatan dan pentingnya Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan, Dukungan Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi pelayanan di Kecamatan, tentu menjadi semangat bersama dalam pembangunan ke depan, dengan spirit Membangun Desa Menata Kota.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi Fraksi Partai Golkar tentang pentingnya Penguatan Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Fasilitasi Kehidupan politik yang demokratis dan tertib, Pencegahan Konflik serta sinergitas dengan Aparat Keamanan dan Pemerintah Desa. Pelaksanaan Pemerintahan Umum melalui peningkatan keamanan dan ketertiban umum yang kondusif, merupakan faktor pendukung terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya membangun kemitraan dengan semua *stakeholder*, sehingga bisa tetap terjaga situasi yang kondusif di masyarakat.

Selanjutnya terkait Capaian Makro Anggaran, secara total capaian realisasi belanja sebesar 92,12% masih terdapat deviasi sebesar 7,8% dari target. Komponen dan proporsi terbesar dari deviasi tersebut disumbangkan dari belanja modal yang capaian realisasi sebesar 83,38%. Hal ini tentu menjadi bagian dari catatan perbaikan pemerintah dalam eksekusi program kegiatan fisik konstruksi.

Terkait struktur dan pola belanja APBD 2024, memang masih didominasi oleh belanja Operasional, kurang lebih 60%. Hal ini karena proporsi terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai hampir 35% dari Total Belanja, menyusul belanja barang dan jasa dengan proporsi hampir sama dengan belanja modal sebesar kurang lebih 20%. Catatan kritis Fraksi Golkar tentu menjadi atensi untuk diperbincangkan bersama dalam pembahasan kebijakan anggaran berikut.

Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi terkait pentingnya ketelitian dalam pencatatan pembukuan atas aset, maupun transparansi dalam optimalisasi aset dan investasi daerah, serta optimalisasi realisasi belanja sehingga bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat pada tahun perencanaan. Secara prinsip setiap belanja yang direncanakan harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat, serta belanja yang berdampak pada peningkatan aset harus tercatat sesuai standar akuntansi dan dapat dimaksimalkan untuk pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu rekomendasi Fraksi terkait Pentingnya Evaluasi terhadap penatausahaan aset, akurasi perencanaan, serta peningkatan kapasitas SDM keuangan menjadi catatan penting untuk dilakukan oleh pemerintah secara bertahap.

VII. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Pemerintah mengucapkan terimakasih atas dukungan Fraksi PKB khususnya dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah. Terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya

PAD yang belum mencapai target, Pemerintah akan berusaha memenuhi permintaan fraksi untuk dapat menggali lagi dan menemukan potensi PAD, agar dimasa datang dapat mencapai target yang ditetapkan.

2. Terhadap kesenjangan antara target pendapatan dan realisasi pendapatan daerah tahun 2024, pemerintah akan berupaya memenuhi permintaan fraksi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menggali objek pendapatan yang baru.
3. Pemerintah berkomitmen agar alokasi anggaran belanja selain diperuntukan untuk urusan wajib pelayanan dasar juga memprioritaskan kebutuhan masing masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
4. Pemerintah sepakat dengan saran Fraksi PKB terkait pengembangan ekonomi kreatif, karena berkembangnya sektor ekonomi kreatif dapat memicu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada.
5. Pemerintah sepakat dengan permintaan Fraksi PKB sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanaja daerah kepada publik. Kabupaten Ngada telah memiliki website sebagai saran publikasi kegiatan pemerintah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu catatan fraksi akan menjadi perhatian pemerintah.
6. Terkait permintaan Fraksi PKB agar pemerintah memberikan penjelasan terkait sumber dan rincian SILPA dapat kami uraikan sebagai berikut :

1) Sumber SILPA tahun anggaran 2024 :

- Kas di Kas Daerah	Rp68,968,697,158.29
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp483,565,743.67
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp67,301,000.00
- Kas di BLUD	Rp5,898,251,216.13
- Kas di Bendahara BOS	Rp106,169,373.00
- Kas di Bendahara FKTP	Rp1,110,594,404.84
- Kas Lainnya	Rp1,811,128,813.08
- Kas Dana BOSP dan PAUD	Rp675,000.00
- Kas Dana BOK Puskesmas	Rp3,119,548,895.00
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga	Rp(1,819,204,113.55)
Jumlah SILPA tahun 2024	Rp 79,746,727,490.46

2) Penggunaan SILPA di Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 22,487,950,000.00 untuk membiayai program dan kegiatan sesuai rencana yang termuat dalam APBD 2025.

3) Terkait rincian alokasi SILPA dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ SILPA yang dibatasi Penggunaannya :

- Belanja BLUD	Rp5,898,251,216.13
----------------	--------------------

- Belanja BOS Rp106,169,373.00
 - Belanja FKTP Rp1,110,594,404.84
 - Kas Dana BOSP dan PAUD Rp675,000.00
 - Belanja BOK Rp3,119,548,895.00
 - Belanja atas Dana Kas Lainnya (Jaminan Kesungguhan Tambang) Yang Wajib Dikembalikan berdasarkan nilai Kurs Rupiah Terkini Rp1,762,159,689.00
 - Sisa Dana Non Kapitasi Yang Harus Dianggarkan kembali di Dinkes Rp398,780,341.26
 - BTT untuk Dana Pihak Ketiga (KONI, Dana Bencana) yang tercatat sebagai Kasda Rp1,250,000,000.00
 - Retensi 2023 dan 2024 Rp2,476,529,000.00
 - Penggunaan SiLPA di Induk 2025 Rp 22,487,950,000.00
 - Sisa Dana Earmarked (DAK Fisik dan Non Fisik) Rp 36,054,900,000.00
- Jumlah SILPA yang dibatasi Penggunaannya Rp 74,665,557,919.23
- SILPA yang tidak dibatasi penggunaannya Rp 5,081,169,571.23

PENUTUP

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam menanggapi pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024. Pemerintah berharap agar dalam Rapat di Tingkat Komisi, Gabungan Komisi maupun Badan Anggaran dan Bapemperda, dapat didiskusikan kebijakan dan saran konstruktif untuk perbaikan ke depan, dalam semangat kebersamaan membangun Ngada yang lebih baik kedepan.

Terima kasih atas kemitraan dan kerjasama yang telah dibangun, Semoga Tuhan selalu bersama kita.

Bajawa, 14 Juli 2025
BUPATI NGADA

RAYMUNDUS BENA, SS.,M.HUM